



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab, II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yg tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pilihan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang pariwisata , adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2018.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan:



1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 70);
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 64);



32. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 65);
33. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 Nomor 36).

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2018 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan LRA
 2. Belanja
- B. Neraca
 1. Aset
 2. Kewajiban
 3. Ekuitas
- C. Laporan Operasional
 1. Pendapatan LO
 2. Beban
 3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
- D. Laporan Perubahan Ekuitas
 1. Ekuitas Awal
 2. Surplus / Defisit LO
 3. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

REALISASI PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAH BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN					
NO REK	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SALDO	
				(Rp)	%
1.	WAJIB				
2.	PILIHAN	2.350.000.000	2.473.795.000	123.795.000	1.05
JUMLAH		2.350.000.000	2.473.795.000	123.795.000	1.05

REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2018				
NO REK	NAMA SATKER	ANGGARAN	REALISASI	SALDO %
1.	WAJIB			
2.	PILIHAN	16.392.535.542	15.903.495.492	97.02
JUMLAH		16.392.535.542	15.903.495.492	97.02

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

- Pendapatan tidak mencapai target disebabkan karena Disepanjang kawasan wisata pantai sigandu – ujungnegoro telah banyak bermunculan obyek – obyek wisata baru, sehingga pengunjung (wisatawan) tidak hanya mengunjungi (parkir kendaraan) di Pantai Sigandu dan ujungnegoro saja melainkan tersebar ke obyek wisata baru tersebut.
- Pendapatan melebihi target disebabkan karena Di beberapa Dtw terdapat penambahan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang wisatawan.
- Belanja tidak terserap (yang lebih dari 10%) disebabkan karena sesuai kebutuhan.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca , Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja .

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan – LRA menggunakan basis kas,

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Realisasi PAD Tahun 2018 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	-	-	
Hasil Retribusi Daerah	2.350.000.000,00	2.475.225.000,00	2.426.430.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	
	2.350.000.000,00	2.475.225.000,00	2.426.430.000,00

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi PAD Tahun 2018 lebih besar Rp 123.795.000,- atau 1.05%. Pendapatan melampaui target karena adanya fasilitas penunjang yaitu sarana dan prasarana di beberapa DTW.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, realisasi PAD Tahun 2018 lebih besar Rp 47.365.000,- atau meningkat 1.98%. disebabkan karena adanya fasilitas sarana dan prasarana di beberapa DTW

Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang yaitu Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan kontribusi 96,40%.

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2018 dan 2017 diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Retribusi Daerah



Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang tahun anggaran 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

<i>il Retribusi Daerah:</i>	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
ribusi Jasa Usaha	-	-	
Retribusi Pemakaian Kekaya	114.559.500,00	131.191.000,00	131.305.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	
Retribusi terminal	-	-	
Retribusi Tempat Khusus Par	140.767.000	78.583.000,00	139.666.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi da	2.094.673.500	2.264.021.000,00	2.155.459.000,00
	-	-	
	2.350.000.000,00	2.473.795.000,00	2.426.430.000,00

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil retribusi Daerah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Tahun 2018 lebih besar Rp 123.795.000,- atau 1.05%.

Adapun penjelasan masing-masing Retribusi bila dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Usaha
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi dari target sebesar Rp 16.631.500,-
 - b) Retribusi Tempat Khusus parkir kurang dari target sebesar Rp 62.184.000 disebabkan karena di sepanjang jalan kawasan wisata sigandu – ujung negoro terdapat obyek wisata baru sehingga pengunjung tidak mau di kasih karcis parkir.
 - c) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga melebihi dari target sebesar Rp 169.347.500,- disebabkan karena beberapa DTW adanya penambahan sarana dan prasarana di Obyek wisata.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, realisasi retribusi Tahun 2018 lebih besar Rp 48.795.000,- atau naik 0.98%.

Berikut kami sampaikan penjelasan realisasi masing-masing retribusi jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebagai berikut ;

- 1) Retribusi Jasa Usaha
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 114.000,-
 - b) Retribusi Tempat Khusus parkir mengalami penurunan sebesar Rp 61.083.000,- karena di sepanjang jalan kawasan wisata sigandu – ujung negoro terdapat obyek wisata baru sehingga



- c) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga mengalami kenaikan sebesar Rp 109.992.000,- karena beberapa DTW adanya penambahan sarana dan prasarana di Obyek wisata.

b. Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Anggaran dan realisasi belanja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	13.314.139.877	12.865.740.242	96.63
2.	Belanja Modal	3.078.395.665	3.037.755.250	98.68
	JUMLAH	16.392.535.542	15.903.495.492	97.02

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2017 lebih rendah Rp 4.519.315.579,- atau 0.71%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 maka realisasi belanja tahun 2018 naik sebesar Rp 4.519.315.579,- atau 1.3%. Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

2018				2017	
NO	URAIAN	ANGGARAN(Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	13.314.139.877	12.865.740.242	8.741,495.869	0.67
2.	Belanja Modal	3.078.395.665	3.037.755.250	2.642.684.044	0.86
	JUMLAH	16.392.535.542	15.903.495.492	11.384.179.913	0.71

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja

1) BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi Dinas Pariwisata ^{Kepemudaan} dan Olahraga Kabupaten Batang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

2018				2017	
NO	URAIAN	ANGGARAN(Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.843.259.577	4.665.673.394	4.442.253.653	0.95
2.	Belanja Barang	8.470.880.300	8.200.066.848	4.319.242.216	52.67
	JUMLAH	13.314.139.877	12.865.740.242	8.741.495.869	0.67



Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2018 lebih rendah Rp 448.399.635,- atau 3.37%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, realisasi belanja operasi Tahun 2018 lebih besar Rp 4.124.244.373,- atau 0.67%.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
Belanja Tidak Langsung			
Gaji dan Tunjangan	2.199.692.440	2.155.258.360	97.98
Tambahan Penghasilan PNS	949.068.137	920.282.234	96.97
	3.148.760.577	3.075.540.594	99.05
Belanja Langsung			
Honorarium PNS	450.725.000	415.475.000	92.18
Honorarium Non PNS	1.097.350.000	1.067.000.000	97.23
Uang Lembur	7.424.000	5.532.800	75.53

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp. 4.665.673.394,- (96.33%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 177.586.183,- (3.67%). Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 3.075.540.594,-, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp 1.488.007.800,00, diantaranya dalam bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim dan honorarium tenaga ahli.

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung :

- a) Gaji dan tunjangan tidak terserap sebesar Rp 44.434.080,- dikarenakan sesuai kebutuhan serta ada pengembalian tunjangan antara lain :
 - Pengembalian Tunjangan Fungsional umum bulan februari 2018 An PNS Uswatun Khasanah.Skom,NIP 19871017 201001 2 024 senilai Rp. 185.000,- dengan no sts 001/sts/3.02.01.01/2018.
 - Pengembalian Tunjangan Fungsional umum bulan februari 2018 An PNS Haryono,ST,NIP 19871027 201001 1 024 senilai Rp. 185.000,- dengan no sts 002/sts/3.02.01.01/2018.
 - Pengembalian Tunjangan Fungsional umum bulan Maret 2018 An PNS Uswatun Khasanah.Skom,NIP 19871017 201001 2 024 senilai Rp. 185.000,- dengan no sts 004/sts/3.02.01.01/2018.
 - Pengembalian Tunjangan Fungsional umum bulan Maret 2018 An PNS Haryono,ST,NIP 19871027 201001 1 024 senilai Rp. 185.000,- dengan no sts 003/sts/3.02.01.01/2018.



- Pengembalian Tunjangan Fungsional umum bulan April – Mei 2018 An PNS Uswatun Khasanah.Skom,NIP 19871017 201001 2 024 senilai Rp. 370.000,- dengan no sts 006/sts/3.02.01.01/2018.
 - Pengembalian Tunjangan Fungsional umum bulan April – Mei 2018 An PNS Haryono,ST,NIP 19871027 201001 1 024 senilai Rp. 370.000,- dengan no sts 005/sts/3.02.01.01/2018.
 - Pengembalian Tunjangan Fungsional umum bulan November 2018 An PNS Ida Purwanti.SPd.MSi NIP 19720930 200901 2 001 senilai Rp. 185.000,- dengan no sts 009/sts/3.02.01.01/2018.
- b) Tambahan penghasilan PNS tidak terserap sebesar Rp 28.785.903,-dikarenakan sesuai kebutuhan
- c) Biaya pemungutan pajak daerah tidak terserap sebesar Rp 36.875.000,-dikarenakan sesuai kebutuhan.

2) Belanja Langsung.

- a) Honorarium PNS tidak terserap sebesar Rp 35.250.000,-dikarenakan sesuai kebutuhan serta ada pengembalian kelebihan honorarium pengelola keuangan senilai Rp. 14.700.000,-.
- b) Honorarium non PNS tidak terserap sebesar Rp30.350.000,-dikarenakan sesuai kebutuhan
- a) Uang lembur tidak terserap sebesar Rp 1.891.200,-dikarenakan sesuai kebutuhan

b) Belanja Barang

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Lebih kurang	%
Bahan Pakai habis	664.983.600	620.180.600	93.26	44.803.000	6.74
Bahan Material	469.140.000	468.700.175	99.91	439.825	0.09
Jasa Kantor	1.547.551.800	1.463.833.844	94.59	83.717.956	5.41
Perawatan Kendaraan Bermotor	139.014.000	136.622.350	98.28	2.391.650	1.72
Cetak dan Penggandaan	586.096.400	579.054.350	98.80	7.042.050	1.2
Sewa	1.429.490.000	1.379.322.000	96.49	50.168.000	3.51
Makan Minum	927.087.500	914.275.000	98.62	12.812.500	1.38
Pakaian Dinas	548.875.000	544.594.250	99.22	4.280.750	0.78
Perjalanan Dinas	787.944.500	755.608.279	95.90	32.336.221	4.1
Pemeliharaan	209.600.000	208.175.000	99.32	1.425.000	0.68
Jasa Konsultasi	282.550.000	280.566.000	99.30	1.984.000	0.70
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	240.000.000	232.925.000	97.05	7.075.000	2.95
Uang untuk diberikan kepada	322.360.000	304.360.000	94.42	18.000.000	5.58



masyarakat pihak ketiga					
JUMLAH	8.470.880.300	8.200.066.848	96.80	270.813.452	3.2

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp 8.200.066.848,- atau 96.80% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp 270.813.452,- atau 3.2%.

Berikut kami sampaikan penjelasan masing-masing belanja barang sebagai berikut :

- a) Belanja bahan pakai habis tidak terserap sebesar Rp 44.803.000,-
- b) Belanja bahan/material tidak terserap sebesar Rp 439.825,-
- c) Belanja jasa kantor tidak terserap sebesar Rp 83.717.956,-
- d) Belanja perawatan kendaraan bermotor tidak terserap sebesar Rp 2.391.650,-
- e) Belanja cetak dan penggandaan tidak terserap sebesar Rp 7.042.050,-
- f) Belanja sewa tidak terserap sebesar Rp 50.168.000,-
- g) Belanja makan dan minum tidak terserap sebesar Rp 12.812.500,-
- h) Belanja pakaian dinas dan atributnya tidak terserap sebesar Rp 4.280.750,-
- i) Belanja perjalanan dinas tidak terserap sebesar Rp 32.336.221,-
- j) Belanja pemeliharaan tidak terserap sebesar Rp 1.425.000,-
- k) Belanja jasa konsultasi tidak terserap sebesar Rp 1.984.000,-
- l) Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak terserap sebesar Rp 7.075.000,-
- m) Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak terserap sebesar Rp 4.337.500,-
- n) Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pembicara tidak terserap sebesar Rp 18.000.000,-

2) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

	Tahun 2018		Tahun 2017
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi
Belanja Modal :			
Belanja Tanah	20.000.000	20.000.000	
Belanja Peralatan dan Mesin	512.580.000	485.079.250	61.340.000
Belanja Gedung dan Bangunan	2.460.170.665	2.447.196.000	2.581.344.044
Belanja Jalan.Irigasi dan Jaringan	85.645.000	85.480.000	-
Belanja Aset Tetap Lainnya			
Belanja Aset Lainnya			
	3.078.395.665	3.037.755.250	2.642.684.044



Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2018 lebih rendah Rp 3.037.755.250,- atau 98.68%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi belanja modal Tahun 2018 lebih besar Rp 395.071.206,- atau 0.8%.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva tetap .

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:

	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Lebih/kurang	%
Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.000.000	20.000.000	100	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin :					
Belanja Modal Alat – alat berat	2.500.000	2.500.000	100	0	0
Belanja Modal Pengadaan alat – alat kantor rumah tangga	447.440.000	423.539.250	94.66	23.900.750	5.34
Belanja Modal Pengadaan alat – alat studio	47.000.000	47.000.000	100	0	0
Belanja Modal Pengadaan alat – alat komunikasi	12.040.000	12.040.000	100	0	0
Belanja Modal Pengadaan alat – alat kedokteran	3.600.000	0	0	0	0
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	2.460.170.665	2.447.196.000	99.81	12.794.665	0.19
Belanja Modal Pengadaan Jalan,Irigasi dan Jaringan					
Belanja Modal Pengadaan listrik dan telpon	85.645.000	85.480.000	99.81	165.000	0.19
Jumlah Belanja Modal	3.078.395.665	3.037.755.250	98.68	40.640.415	1.32

berikut kami sampaikan penjelasan realisasi masing-masing belanja modal dibandingkan dengan anggarannya sebagai berikut:

- a) Belanja modal pengadaan tanah terserap 100%
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
 - (1) Belanja modal pengadaan alat-alat berat terserap 100%
 - (2) Belanja modal pengadaan alat-alat kantor rumah tangga tidak terserap sebesar Rp 23.900.000,- (5.34%) dikarenakan sesuai kebutuhan.
 - (3) Belanja modal pengadaan alat-alat studio terserap 100%
 - (4) Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi terserap 100%
 - (5) Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran tidak terserap sebesar Rp 3.600.000,- (100%) dikarenakan setiap event / kegiatan sudah didampingi oleh tenaga dari Dinas Kesehatan maupun tenaga PMI.
- c) Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan tidak terserap sebesar Rp 12.974.665,- (0.19%) dikarenakan sesuai kebutuhan.
- d) Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan :



- (1) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepontidak terserap sebesar Rp 165.000,0 (0.19%) dikarenakan sesuai kebutuhan.

B. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang terbagi dalam :

	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Aset Lancar	174.976.335	127.800.650
2.	Investasi Jangka Panjang		
3.	Aset Tetap	26.290.627.362	24.100.569.977
4.	Aset Tetap Lainnya		
		26.465.603.697	24.228.370.627

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang yaitu sebesar Rp 2.190.057.385,- atau 9.09%.

a. ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

	Aset Lancar	31 Desember 2018	31 Desember 2018
1.	Kas di Kasda		
2.	Kas Di Bendahara Pengeluaran		
3.	Kas Di Bendahara Penerimaan	77.401.000	89.934.750
4.	Kas Di BLUD		
5.	Kas Lainnya		
6.	Piutang Pajak Daerah		
7.	Piutang Retribusi		
8.	Penyisihan Piutang tak tertagih		
9.	Belanja Dibayar dimuka piutang transfer pemerintah pusat		
10.	Dana Perimbangan piutan transfer pemerintah daerah lainnya		



11.	Bagian lancar tuntutan ganti rugi		
12.	Piutang Lainnya		
13.	Persediaan	96.145.335	37.865.900
		173.546.335	127.800.650

1) Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di pemungut sebesar Rp 77.401.000,-

Kas di bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang berupa setoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Semua saldo kas di Bendahara Penerimaan di atas telah disetor pada bulan Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Retribusi Parkir DTW Pantai Sigandu senilai Rp.866.000,- dengan nomor sts 001/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 2 Januari 2019.
- Pendapatan Retribusi DTW Pantai Sigandu senilai Rp.7.329.250,- dengan nomor sts 002/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 2 Januari 2019.
- Pendapatan Retribusi DTW Pantai Ujungnegoro senilai Rp.1.287.250,- dengan nomor sts 003/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 2 Januari 2019.
- Pendapatan Retribusi DTW Kolam Renang Bandar senilai Rp.17.575.000,- dengan nomor sts 008/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 2 Januari 2019.
- Pendapatan Retribusi DTW Sewa Lahan DTW Kolam Renang Bandar senilai Rp.238.000,- dengan nomor sts 007/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 2 Januari 2019.
- Pendapatan Retribusi Sewa lahan senilai Rp.15.000,- dengan nomor sts 010/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 2 Januari 2019.
- Pendapatan Retribusi DTW THR Kramat senilai Rp.1.862.250,- dengan nomor sts 011/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 2 Januari 2019.
- Pendapatan Retribusi Parkir DTW Pantai Ujungnegoro senilai Rp.41.000,- dengan nomor sts 017/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 4 Januari 2019.
- Pendapatan bagi hasil Desa wisata pantai jodo senilai Rp.2.200.000,- dengan nomor sts 021/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 4 Januari 2019.
- Pendapatan bagi hasil Desa wisata Mentosari senilai Rp.2.755.000,- dengan nomor sts 023/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 4 Januari 2019.
- Pendapatan bagi sewa lahan DTW pantai sigandu senilai Rp.10.000.000,- dengan nomor sts 024/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 4 Januari 2019.



- Pendapatan bagi hasil Agro wisata pagilaran senilai Rp.17,456.250,- dengan nomor sts 030/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 7 Januari 2019.
- Pendapatan bagi hasil Desa wisata pantai celong senilai Rp.990.000,- dengan nomor sts 036/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 9 Januari 2019.
- Pendapatan bagi hasil Desa wisata pandan sari senilai Rp.4.037.500,- dengan nomor sts 037/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 9 Januari 2019.
- Pendapatan bagi hasil Desa wisata mentosari senilai Rp.8.265.000,- dengan nomor sts 045/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 11 Januari 2019.
- Pendapatan bagi hasil Desa wisata sangubanyu senilai Rp.1.540.000,- dengan nomor sts 021/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 11 Januari 2019.
- Pendapatan DTW THR Kramat senilai Rp.123.500,- dengan nomor sts 047/k/3.02.01.01/I/2019 disetor pada tanggal 11 Januari 2019.

2) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1. Persediaan ATK		
2. Persediaan Obat-obatan medis		
3. Persediaan Obat-obatan ternak		
4. Persediaan Rumah Tangga		
5. Persediaan Benda Berharga	96.145.335	96.145.335
6. Persediaan Lainnya		
	96.145.335	96.145.335

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

a) Persediaan benda berharga.

Persediaan benda berharga per 31 Desember 2018 sebesar

Rp 96.145.335,- dengan perincian terlampir :

No	Nama Barang	Satuan	Banyaknya	Harga	Jumlah
----	-------------	--------	-----------	-------	--------



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

1.	DTW Agrowisata Pagilaran	Rp. 5.000,-	Buku	1.185	12.265	14.534.025
2.	DTW Cokro Kembang	Rp. 7.500,-	Buku	250	12.265	3.066.250
3.	DTW Pantai Sigandu	Rp. 5.000,-	Buku	2.395	12.265	29.374.675
4.	DTW Pantai Ujung N	Rp. 5.000,-	Buku	800	12.265	9.812.000
5.	DTW Kolam Renang B.	Rp. 5.000,-	Buku	300	12.265	3.679.500
6.	DTW Kolam Renang B.	Rp. 6.000,-	Buku	200	12.265	2.453.000
7.	DTW Pantai Celong	Rp.3.000,-	Buku	300	12.265	3.679.500
8.	DTW Pantai Jodo	Rp. 3.000,-	Buku	300	12.265	3.679.500
9.	DTW Pandan Sari	Rp. 3.000,-	Buku	400	12.265	4.906.000
10.	DTW THR Kramat	Rp.10.000,-	Buku	450	12.265	5.519.250
11.	DTW Tirto As Asyifa Sangubanyu	Rp.10.000,-	Buku	300	12.265	3.679.500
12.	Karcis Parkir Roda 2 DTW Pantai Sigandu	Rp. 1.000,-	Buku	540	12.265	6.623.100
13.	Karcis Parkir Roda 4 DTW Pantai Sigandu	Rp. 3.000,-	Buku	185	12.265	2.269.025
14.	Karcis Parkir Roda 2 DTW Pantai Ujungnegoro	Rp. 1.000,-	Buku	100	12.265	1.226.500
15.	Karcis Parkir Roda 4 DTW Pantai Ujungnegoro	Rp. 3.000,-	Buku	65	12.265	797.225
16.	Karcis Parkir DTW THR Kramat	Rp. 1.000,-	Buku	69	12.265	846.285
Jumlah Persediaan						96.145.335

b. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp 26.290.627.362,-merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:

Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan(RP)	Pengurangan(Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	3.149.523.000	20.000.000	20.000.000	3.149.523.000
Peralatan dan Mesin	3.997.082.636	485.079.250	145.233.500	4.4459.894.386
Gedung dan Bangunan	18.748.416.906	4.196.854.744		22.945.271.650
Jalan.Irigasi dan Jaringan	1.995.528.520	85.480.000		2.081.008.520
Aset Tetap Lainnya	257.006.000	19.992.500		276.998.500
Konstruksi dalam pengerjaan	1.749.658.744		1.749.658.744	0
	29.897.215.806	4.930.372.494	3.015.480.250	39.912.696.056



Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain.

Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodifikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomtable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Penambahan aset tetap

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	Tanah	20.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	485.079.250
3.	Gedung dan Bangunan	2.447.196.000
4.	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	85.480.000
5.	Aset Tetap Lainnya	
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	
		3.037.755.250

b) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

	Uraian	Aset dari Pindahan antar Rekening
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin	122.966.000
3.	Gedung dan Bangunan	1.749.658.744
4.	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya	19.992.500
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	
		1.892.617.244

2) Pengurangan Aset tetap

a) Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening tahun 2018 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

	Uraian	Aset dari Pindahan antar Rekening
1.	Tanah	20.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	145.233.500



3.	Gedung dan Bangunan	
4.	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya	
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.749.658.744
		1.914.892.244

1) Tanah

Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan. Nilai bersih tanah pada tahun 2018 pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Mutasi Penambahan.
Penambahan aset tanah pada tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000,- terdiri dari :
(1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp 20.000.000,-
- b) Mutasi Pengurangan
Pengurangan aset tanah pada tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000,- terdiri dari :
 - Pindahan antar rekening sebesar Rp 20.000.000,-

2) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.459.894.386,- naik sebesar Rp 462.811.750,- atau 11.58% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2017 sebesar Rp 3.997.082.636,-

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:

Peralatan Mesin	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2017	Naik (turun)
Alat –alat besar			
Alat – alat angkutan	3.233.118.926	3.231.718.926	1.400.000
Alat – alat Bengkel dan Ukur			
Alat – alat pertanian dan Peternakan			
Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	1.034.790.360	731.484.610	303.305.750
Alat Studio dan komunikasi	191.985.100	33.879.100	158.106.000
Alat – alat kedokteran			
Alat – alat Laboratorium			
Alat – alat Keamanan			
	4.459.894.386	3.997.082.636	462.811.750

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2018 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Mutasi penambahan
Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp. 485.079.250,- terdiri dari :
(1) Belanja Modal sebesar Rp 485.079.250,-
- b) Mutasi Pengurangan
Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2018 sebesar Rp 462.811.750,- dengan perincian sebagai berikut :



		Mutasi Kurang (Rp)
1.	Hibah	
2.	Koreksi	
3.	Rusak Berat	
4.	Extracountable	22.275.000
5.	Reklasifikasi	
	Pindahan Antar Rekening	145.233.500

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang per 31 Desember 2018 sebesar Rp 22.945.271.650,- naik sebesar Rp 4.196.854.744,- atau 22.39% dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2017 sebesar Rp 18.748.416.906,-

Nilai gedung dan bangunan pada tahun 2018 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

a) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp terdiri dari :

(1) Belanja Modal sebesar Rp. 2.447.196.000,-

(2) Selain Belanja Modal sebesar Rp 1.749.658.744,- dengan perincian sebagai berikut:

		Mutasi Tambah (Rp)
a.	APBN	
b.	Hibah	
c.	Koreksi	
d.	Aset tidak dari Belanja Modal	
e.	Pindahan antar rekening	1.749.658.744

b) Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.749.658.744,- berasal dari:

		Mutasi Kurang (Rp)
1.	Hibah	
2.	Koreksi	
3.	Rusak Berat	
4.	Extracountable	
5.	Reklasifikasi	
	Pindahan Antar Rekening	1.749.658.744

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.081.008.520,- naik sebesar Rp 85.480.000,- atau 4.28%



dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2017 sebesar Rp 1.995.528.520,-Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2018:

Jalan,Irigasi dan Jaringan	Neraca per 31 Des 2018	Neraca per 31 Des 2017	Naik (turun)
Jalan dan Jembatan	1.494.795.000	1.494.795.000	0
Bangunan Air	170.000.000	170.000.000	0
Instalasi	414.114.000	328.634.000	85.480.000
Jaringan	2.099.520	2.099.520	0
	2.081.008.520	1.995.528.520	85.480.000

Niai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

a) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 sebesar Rp 85.480.000,- terdiri dari :

(1) Belanja Modal sebesar Rp 85.480.000,-

5) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang per 31 Desember 2018 sebesar Rp 276.998.500,- naik sebesar Rp 19.992.500,-atau 18.68.% dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2017 sebesar Rp 257.006.000,-

Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

Aset Tetap Lainnya	Neraca Per 31 Des 18	Neraca Per 31 Des 17	Naik turun
Buku dan Kepustakaan	150.000.000	150.000.000	0
Barang Bercorak Seni Kebudayaan	126.998.500	107.006.000	19.992.500
Hewan Ternak dan Tumbuhan			
	276.998.500	257.006.000	19.992.500

Niai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

a) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan aset tetap Lainnya tahun 2018 sebesar Rp19.992.500,- terdiri dari :

(1) Selain Belanja Modal sebesar Rp 19.992.500,- dengan perincian sebagai berikut:

		Mutasi Tambah
a.	APBN	
b.	Hibah	
c.	Koreksi	
d.	Aset tidak dari Belanja Modal	
e.	Reklasifikasi	
f.	Pindahan antar rekening	19.992.500



6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- sedangkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.749.658.744,-.

3) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2018 dan perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2017 sebagai berikut :

	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2018	Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.622.068.694)	(5.796.645.829)	(825.422.865)
	(6.622.068.694)	(5.796.645.829)	(825.422.865)

1. KEWAJIBAN

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2018, kewajiban Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Pariwisata Kabupaten Batang terdiri dari:

Uraian	Neraca Per 31 Des 2018	Neraca Per 31 Des 2017	Naik (turun)
Kewajiban Jangka Pendek	77.757.940	79.877.583	2.119.643
Kewajiban Jangka Panjang			
	77.757.940	79.877.583	2.119.643

a. Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Tahun 2018 terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		
Hutang Bunga		
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang		
Pendapatan diterima dimuka		
Hutang Belanja	77.757.940	79.877.583
Hutang Jangka Pendek Lainnya		

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

1) Hutang Belanja.



Meliputi Utang listrik, telpon, air dan TPP bulan Desember 2018 yang baru dibayar bulan Januari 2019 sebesar Rp 77.757.940,-

2. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017(Rp)
Ekuitas	26.386.415.757	24.148.493.044
	26.386.415.757	24.148.493.044

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada tahun 2018 Pendapatan-LO Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang direalisasikan sebesar Rp 2.473.795.000,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2017 sebesar Rp 2.426.430.000,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp 47.365.000,- atau 0.98%.

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2018 dengan tahun 2017 sebagai berikut :

		Tahun 2018 Realisasi (Rp)	Tahun 2017 Realisasi (Rp)	Kenaikan Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.473.795.000	2.426.430.000	47.365.000	0.98
2.	Pendapatan Transfer				
3.	Lain – lain Pendapatan Yang Sah				
		2.473.795.000	2.426.430.000	47.365.000	0.98

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2017, dengan kenaikan tertinggi ada pada Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan kenaikan sebesar Rp 108.562.000,-

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah



Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

Pendapatan Asli Daerah		Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan penurunan	%
1.	Pajak Daerah				
2.	Hasil Retribusi Daerah	2.473.795.000	2.426.430.000	47.365.000	0.98
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
		2.473.795.000	2.426.430.000	47.365.000	0.98

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terdapat jenis pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Retribusi Tempat Khusus Parkir.

1) **Pendapatan Retribusi Daerah.**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :

Hasil Retribusi Daerah	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan Rp
Retribusi Jasa Usaha			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	131.191.000	131.305.000	114.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir	78.583.000	139.666.000	(61.083.000)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.264.021.000	2.155.459.000	108.562.000
	2.473.795.000	2.426.430.000	47.365.000

2. **BEBAN**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain.



Selama tahun 2018, beban Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang adalah sebesar Rp 13.633.801.751,- dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp 9.627.353.703,- maka mengalami peningkatan sebesar Rp 4.006.448.048,- atau 41.67%. Berikut realisasi beban 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 :

Beban	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	3.163.401.602	3.271.443.053	(108.041.451)	96.70
Beban Pegawai BLUD				
Beban Persediaan	1.263.526.340	633.132.200	638.742.675	200.89
Beban Jasa	6.952.157.593	3.812.412.276	3.139.745.317	182.36
Beban Pemeliharaan	344.797.350	340.353.300	4.444.050	101.31
Beban Perjalanan Dinas	755.608.279	502.934.323	252.673.956	150.24
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah	325.850.000	232.625.000	93.225.000	140.08
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	828.460.587	836.420.587	(7.960.000)	99.05
	13.633.801.751	9.629.320.739	4.006.448.048	141.62

a. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.163.401.602,- apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 3.271.443.053,- mengalami penurunan sebesar Rp 108.041.451,-. Beban pegawai tersebut termasuk di dalamnya beban pegawai BLUD.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

Beban Pegawai	Nominal (Rp)
Gaji dan Tunjangan PNS	2.155.258.360
Tambahan Penghasilan PNS	920.282.234
Belanja Penerimaan lainnya Pimp & Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	
Biaya Pemungutan Pajak	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	88.125.000
Uang Lembur	5.532.800

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.



Beban persediaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.263.526.340,-sedangkan pada tahun 2017 beban persediaan adalah sebesar Rp 633.132.200,-sehingga bertambah sebesar Rp 630.394.140,- atau 99.57%. Beban Persediaan terdiri dari :

Beban Persediaan	Nominal (Rp)
Bahan Pakai Habis	620.180.600
Bahan Material	468.700.175
Cetak dan Penggandaan	579.054.350
Jasa Konsultasi	280.566.000
Belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat	304.360.000

c. Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.

Beban jasa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.952.157.593,- sedangkan pada tahun 2017 beban jasa adalah sebesar Rp 3.812.412.276,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 3.139.745.317,- atau naik 182.36%.

Beban Jasa terdiri dari :

Beban	Nominal (Rp)
Honorarium PNS	415.475.000
Honorarium Non PNS	1.067.000.000
Jasa Kantor	1.463.833.844
Premi Asuransi	
Cetak dan Penggandaan	579.054.350
Sewa	1.379.322.000
Makan Minum	914.275.000
Pakaian Dinas	544.594.250
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek	
Jasa Konsultasi	280.566.000
Survey dan Penyusunan Design Engineering	
Belanja barang dan jasa BLUD	
Belanja JKN	
Uang yang diberikan ke masyarakat	311.850.000
Belanja jasa narasumber	304.360.000
Belanja Telp, listrik air 2017	3.724.183
	6.952.157.593



d. Beban Pemeliharaan.

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 344.797.350,-sedangkan pada tahun 2017 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp340.353.300,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 4.444.050,- atau naik sebesar 01.31%.

Beban pemeliharaan tahun 2018 terdiri dari :

Beban Pemeliharaan	Nominal (Rp)
Perawatan Kendaraan bermotor	136.622.350
Pemeliharaan Gedung	208.175.000
	344,797.350

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 755.608.279,-sedangkan pada tahun 2017 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp 502.934.323,-.sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 252.673.956,-atau naik sebesar 50.24%.

Beban Perjalanan Dinas	Nominal (Rp)
Perjalanan Dinas	755.608.279
	755.608.279

f. Beban Hibah

Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat,dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 325.850.000,- sedangkan pada tahun 2017 beban hibah adalah sebesar Rp 232.625.000,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 93.225.000,- atau naik sebesar 40%

Beban hibah terdiri dari :

Beban Hibah	Nominal (Rp)
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.000.000
Uang yang diserahkan ke masyarakat	311.850.000
Belanja Hibah	
	325.850.000

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 828.460.587,- sedangkan pada tahun 2017 beban penyusutan adalah sebesar Rp 836.420.587,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 7.960.000,- atau turun sebesar 0.95%

h. Beban Penyisihan Piutang

merupakan piutang yang disisihkan pada tahun 2018 sebesar Rp 0,- Sedangkan pada tahun 2017 beban penyisihan piutang adalah sebesar Rp 0,-

i. Beban Lain-lain.

Beban Lain-lain tahun 2018 sebesar Rp0,00

3. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2018, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.475.225.000,- dan realisasi beban Rp. 13.633.801.751,- maka Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang mengalami surplus/defisit sebesar Rp(11.158.576.751) Apabila dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2017 sebesar Rp (7.200.923.703) maka terjadi kenaikan sebesar Rp (3.957.653.048,-) atau naik sebesar 54.96%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan	2.473.795.000	2.426.430.000	48.795.000	102.01
Beban	13.633.801.751	9.627.353.703	4.006.448.048	141.62
Jumlah	(11.160.006.751)	(7.200.923.703)	(3.957.653.048)	154.98

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Tahun 2018 adalah sebesar Rp 24.151.530.766,- Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2017.

2. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Tahun 2018 adalah sebesar Rp (11.160.006.751),-yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

3. Koreksi Ekuitas Lainnya.

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2018 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2018.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp 13.394.891.742,-.dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2018(Rp)
1.	Penambahan aset tetap	1.892.617.244
2.	Pengurangan AT Karena Extracountable	(22.275.000)



3.	Pengurangan AT Karena Pindahan antar rekening	(1.892.617.244)
		13.394.891.742

Berikut penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2018 sebagai berikut :

a. Penambahan aset tetap

Penambahan aset tetap dari Pindahan antar rekening sebesar Rp 1.892.617.244 terdiri dari :

- a. Penambahan aset tetap dari pindahan antar rekening Rp. 1.892.617.244,-

b. Pengurangan Aset Tetap

Pengurangan aset tetap sebesar Rp 1.892.617.244 terdiri dari :

Pengurangan Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)
Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan	
Pengurangan Karena Mutasi Ke SKPD Lain	
Pengurangan karena Hibah	
Pengurangan karena SK koreksi	
Pengurangan karena rusak berat	
Pengurangan karena extracountable	(22.275.000)
Pengurangan karena pindahan antar rekening	(1.892.617.244)
Pengurangan karena lain – lain	

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 26.386.415.757,- dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2017 sebesar Rp 24.151.530.766,-.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2018 pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang Tahun 2018. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, Januari 2018

**KEPALA DINAS
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG**

WAHYU BUDI SANTOSO.S.Sos.MM
NIP 19701017 199003 1 002